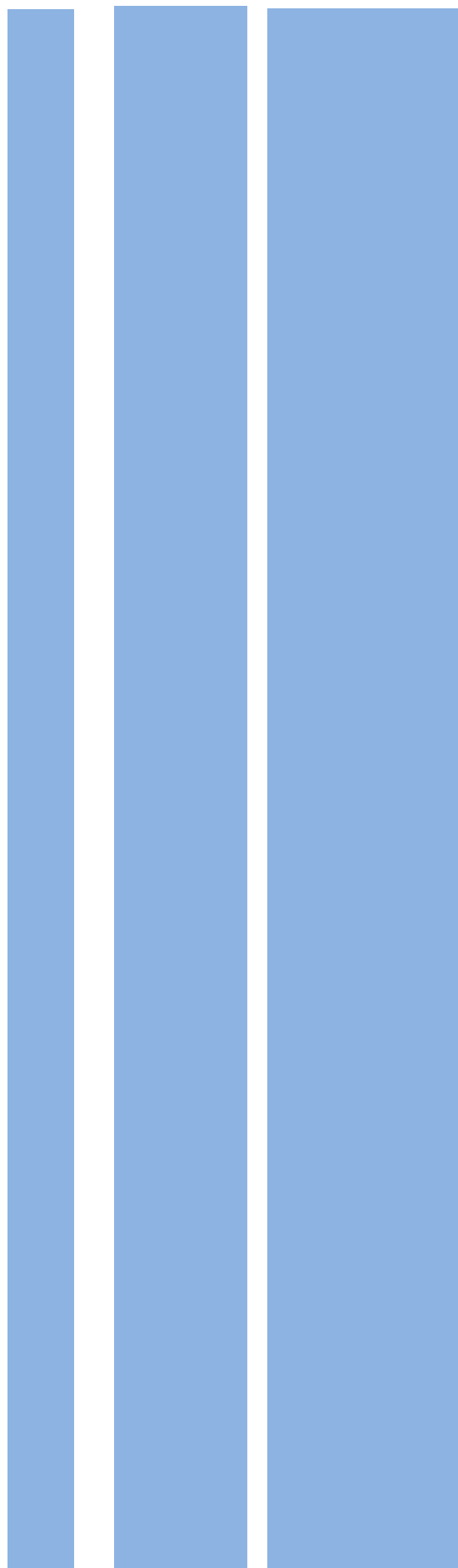


Laporan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
UAKPA
005.01.578850
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025
UNAUDITED

Jl. Prof. Moh. Yamin. No. 52
Palu, Sulawesi Tengah 94231



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Palu, 10 Februari 2025

sekretaris,

Amelda Christine

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	3
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI. Lampiran dan Daftar	

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Moh. Yamin Nomor 52 Palu PALU Sulawesi Tengah 94121

Telp. 0451 483385 Fax. 0451- 483385 e-mail : ptun.palu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tingkat UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Palu, 20 Februari 2025

Incidia Christine

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada T.A 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.4.273.458,- atau mencapai 140 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.10.714.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada T.A 2025 adalah sebesar Rp.6.302.665.943,- atau mencapai 99,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.325.025.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.57.143.373.849; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.807.265; Kewajiban Jangka Pendek (neto) sebesar Rp.1.769.954.040; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.57.140.566.584; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.769.954.040,- dan Rp.55.373.419.809,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.11.846.425,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.9.432.496.506,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (9.420.650.081). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.3.141.033,- dan Rp.(9.417.509.048) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (9.417.509.048,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.57.996.277.872,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(9.417.509.048) kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset tetap Rp.0,-, kemudian ditambah koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.6.794.650.985,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.55.373.419.809,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-25		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10.714.000	14.987.458	139,89	21.961.755
JUMLAH PENDAPATAN		10.714.000	14.987.458	139,89	21.961.755
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.082.820.000	5.061.629.551	99,58	3.115.433.666
Belanja Barang	B.4	1.122.205.000	1.121.376.393	99,93	1.295.051.742
Belanja Modal	B.5	120.000.000	119.659.999	99,72	29.500.000
JUMLAH BELANJA		6.325.025.000	6.302.665.943	99,65	4.439.985.408

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-25	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	1.494.515	1.416.815
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.312.750	6.076.280
Jumlah Aset Lancar		2.807.265	7.493.095
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	28.200.151.000	28.200.151.000
Peralatan dan Mesin	C.15	6.714.805.637	6.279.149.912
Gedung dan Bangunan	C.16	27.943.847.058	27.943.847.058
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	15.254.000	15.254.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.733.491.111)	(4.449.447.202)
Jumlah Aset Tetap		57.140.566.584	57.988.954.768
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		57.143.373.849	57.996.447.863
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1.769.954.040	169.991
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.769.954.040	169.991
JUMLAH KEWAJIBAN		1.769.954.040	169.991
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	55.373.419.809	57.996.277.872
JUMLAH EKUITAS		55.373.419.809	57.996.277.872
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		57.143.373.849	57.996.447.863

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-25	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.846.425	10.862.400
JUMLAH PENDAPATAN		11.846.425	10.862.400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.807.802.226	3.115.433.666
Beban Persediaan	D.3	52.207.497	52.020.958
Beban Barang dan Jasa	D.4	693.789.694	728.402.327
Beban Pemeliharaan	D.5	319.713.406	347.715.348
Beban Perjalanan	D.6	83.963.000	166.691.829
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.475.020.683	1.418.896.970
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		9.432.496.506	5.829.161.098
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.420.650.081)	(5.818.298.698)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.141.033	11.099.355
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.141.033	11.099.355
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.417.509.048)	(5.807.199.343)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.417.509.048)	(5.807.199.343)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-25	2024
EKUITAS AWAL	E.1	57.996.277.872	59.739.153.277
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.417.509.048)	(5.807.199.343)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(368.699.715)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(368.699.715)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	(368.699.715)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.794.650.985	4.433.023.653
EKUITAS AKHIR	E.5	55.373.419.809	57.996.277.872

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2025 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2010 sampai dengan 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah .

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Rencana Penyelesaian Perkara
- Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
- Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
- Peningkatan Kualitas Pengawasan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan, Modul Aset Tetap, dan Modul Persediaan. SAKTI Modul General Ledger dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sakti Modul Aset Tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
 - Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
 - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)
 - Pendapatan Ongkos Perkara
 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
 - Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.714.000	10.714.000
Jumlah Pendapatan	10.714.000	10.714.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.082.820.000	5.082.820.000
Belanja Barang	1.122.205.000	1.122.205.000
Belanja Modal	120.000.000	120.000.000
Jumlah Belanja	6.325.025.000	6.325.025.000

Realisasi

Pendapatan

Rp.14.987.458,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.14.987.458,- atau mencapai 139 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.10.714.000,-. Pendapatan di yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	10.714.000	14.987.458	139,89
Jumlah	10.714.000	14.987.458	139,89

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar (31,76)% dibandingkan realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan T.A 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
PNBP	14.987.458	21.961.755	-31,76
Jumlah	14.987.458	21.961.755	-31,76

B.2. BELANJA

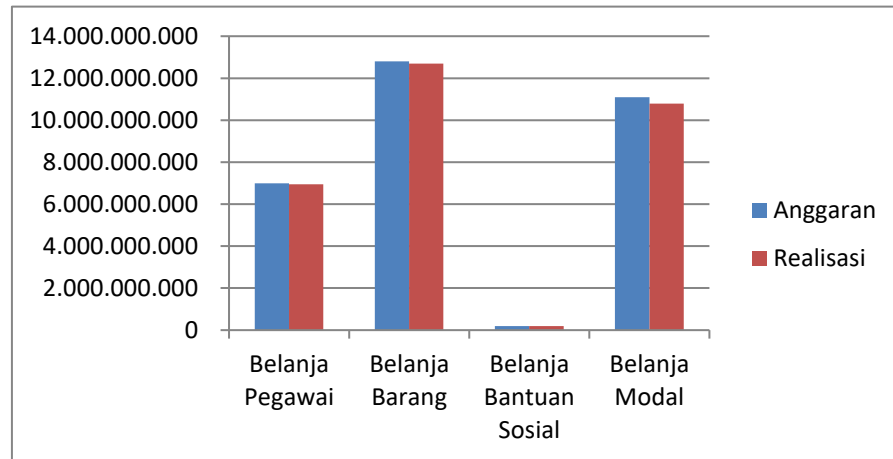
Realisasi Belanja Negara Rp. 6.302.665.943,-

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 6.302.665.943,- atau 99,65% dari anggaran belanja sebesar Rp.6.325.025.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.082.820.000	5.062.554.567	99,60
Belanja Barang	1.122.205.000	1.121.376.393	99,93
Belanja Modal	120.000.000	119.659.999	99,72
Total Belanja Kotor	6.325.025.000	6.303.590.959	99,66
Pengembalian Belanja	-	(925.016)	
Total Belanja	6.325.025.000	6.302.665.943	99,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 41,95% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2024. Hal ini disebabkan karena Pagu Anggaran Tahun 2025 lebih besar dibanding Pagu Anggaran Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.061.629.551	3.115.433.666	62,47
Belanja Barang	1.121.376.393	1.295.051.742	(13,41)
Belanja Modal	119.659.999	29.500.000	305,63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	6.302.665.943	4.439.985.408	41,95

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp.
5.061.629.551,-*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.061.629.551,- dan Rp.3.115.433.666. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 62,47%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.061.629.551	3.115.433.666	62,47
Belanja Gaji Pokok PNS	1.348.602.540	1.103.511.140	22,21
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.245	15.021	21,46
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	92.916.872	85.284.340	8,95
Belanja Tunjangan Anak PNS	20.414.353	20.671.502	(1,24)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.180.000	40.320.000	(10,27)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	69.250.000	1.359.150.000	(94,90)
Belanja Tunjangan PPh PNS	9.407.235	193.986.463	(95,15)
Belanja Tunjangan Beras PNS	62.426.040	54.749.520	14,02
Belanja Uang Makan PNS	225.541.000	168.582.000	33,79
Belanja Tunjangan Umum PNS	11.585.000	4.995.000	131,93
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	143.100.000	85.050.000	68,25
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	375.433.334	-	
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.482.600.000	-	
Belanja Gaji Pokok PPPK	129.884.800	-	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.476	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5.853.520	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.828.832	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.952.320	-	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	32.498.000	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Umum PPPK	8.060.000	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	5.062.554.567	3.116.314.986	62,45
Pengembalian Belanja Pegawai	(925.016)	(881.320)	4,96
Jumlah Belanja	5.061.629.551	3.115.433.666	62,47

Belanja

Barang

Rp.1.121.376.393,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.121.376.393,- dan Rp.1.295.051.742,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (13,41)% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	589.753.104	708.473.204	(16,76)
Belanja Barang Non Operasional	915.000	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	79.587.916	19.928.523	299,37
Belanja Pemeliharaan	310.223.730	337.943.748	(8,20)
Belanja Perjalanan Biasa	81.263.000	162.191.829	(49,90)
Belanja Perjalanan Dalam Kota	2.700.000	4.500.000	(40,00)
Belanja Barang untuk persediaan	56.933.643	62.014.438	(8,19)
Jumlah Belanja Kotor	1.121.376.393	1.295.051.742	(13,41)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.121.376.393	1.295.051.742	(13,41)

Belanja Modal

Rp.119.659.999,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.119.659.999,- dan Rp.29.500.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 2025 dan 2024 mengalami peningkatan sebesar (305,63)%, hal ini disebabkan karena pada TA 2025 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.659.999	29.500.000	305,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	119.659.999	29.500.000	305,63
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	119.659.999	29.500.000	305,63

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2025 dan 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2025 adalah sebesar Rp.119.659.999,-, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2025 dan 2024 mengalami peningkatan sebesar (305,63%), hal ini disebabkan karena pada TA 2024 tidak terdapat pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.659.999	29.500.000	305,63
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	119.659.999	29.500.000	305,63

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal T.A 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2025 mengalami penurunan sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada TA 2025 tidak terdapat Pagu belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Realisasi Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan TA 2025 tidak mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini disebabkan karena pada TA 2025 dan TA 2024 tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2025 dan 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2025	2024
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Kwitansi yang belum diSP2Dkan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal T.A 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp.0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TP/TGR Rp.0 **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2025 dan 2024

No	Nama	T.A 2025	2024
1		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA Rp.0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	2025	2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar Rp.0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar
Tahun 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp.1.494.515*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.1.494.515 dan Rp.1.416.815. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	2025	2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Web Hosting	1.494.515	1.416.815
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	1.494.515	1.416.815

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp.0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima Tahun 2025 dan 2024*

Jenis	2025	2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan Rp.1.312.750 Nilai Persediaan per T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.1.312.750,- dan Rp.6.076.280,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	1.312.750	6.076.280
Barang untuk Pemeliharaan		-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.312.750	6.076.280

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR Rp.0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per T.A 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahun 2025 dan 2024

No	Debitur	2025	2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp.0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian TPA untuk T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	2025	2024
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.28.200.151.000 dan Rp.28.200.151.000 .

Tanah
Rp.28.200.151.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	28.200.151.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	28.200.151.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	28.200.151.000

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.
6.714.805.637

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.714.805.637,- dan Rp.6.279.149.912. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	6.279.149.912
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	626.632.499
Penggunaan Kembali BMN	Rp	119.659.999
Transfer Masuk	Rp	506.972.500
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	(190.976.774)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	(190.976.774)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	6.714.805.637
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	(4.114.629.727)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	2.600.175.910

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.27.943.847.058*

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.27.943.847.058,- dan Rp.27.943.847.058. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	27.943.847.058
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Bertambah	25.663.635.965
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai Berkurang	(25.663.635.965)
Saldo per 31 Desember 2025	27.943.847.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.603.797.384)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	26.340.049.674

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi dan jaringan listrik.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.15.254.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.15.254.000 dan Rp.15.254.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	15.254.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	15.254.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(15.064.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	190.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	100	0-	
2	-	-	0	0-	
	Jumlah	-		-	

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
(5.733.491.111)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp.(5.733.491.111) dan Rp.(4.449.447.202). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 28.200.151.000	Rp -	Rp 28.200.151.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 6.714.805.637	Rp (4.114.629.727)	Rp 2.600.175.910
3	Gedung dan Bangunan	Rp 27.943.847.058	Rp (1.603.797.384)	Rp 26.340.049.674
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 15.254.000	Rp (15.064.000)	Rp 190.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 62.874.057.695	Rp (5.733.491.111)	Rp 57.140.566.584

*Aset Tak
Berwujud Rp.0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	0
ATB Lainnya	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Amortisasi s/d 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Aset Lain-Lain

Rp.0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.416.576.474. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap/Henti Guna	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp. 0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	0	0	0
Aset Tetap Henti Guna	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
1.769.954.040

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.1.769.954.040,- dan Rp.169.991,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 1.746.172.675
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 23.781.365
3	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp 1.769.954.040

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	-
Instansi Pemerintah Lainnya	-	-
Badan Lainnya	-	-
Total	-	

*Beban yang
Masih harus
Dibayar Rp.
1.769.954.040,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.1.769.954.040,- dan Rp.169.991, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.769.954.040	169.991
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	1.769.954.040	169.991

C.28 Ekuitas

Ekuitas Rp.
57.373.419.809,-

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.57.373.419.809,- dan Rp.57.996.277.872,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.11.846.425

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.11.846.425,- dan Rp.10.862.400,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian PNBP TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	11.846.425	10.862.400	9,06
Jumlah	11.846.425	10.862.400	9,06

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pendapatan yang berasal dari biaya sewa rumah dinas dan persekot gaji.

Beban

Pegawai

Rp.6.807.802.226

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.807.802.226,- dan Rp.3.115.433.666,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.348.620.769	1.103.525.381	22
Beban Tunjangan-Tunjangan	5.459.181.457	2.011.908.285	171
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	6.807.802.226	3.115.433.666	119

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.52.207.497*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.52.207.497,- dan Rp.52.020.958,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	52.207.497	52.020.958	0,36
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	52.207.497	52.020.958	0,36

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.693.789.694*

Beban Barang dan Jasa T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.693.789.694,- dan Rp.728.402.327. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	542.118.404	670.345.204	-19,13
Beban Sewa	76.473.782	17.001.781	349,80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	2.994.700	4.000.000	-25,13
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.640.000	34.128.000	30,80
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	670.000	0	#DIV/0!
Beban Bahan	245.000	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Op. Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Op. Lainnya - Penanganan Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	23.611.474	0	#DIV/0!
Beban Langganan Telepon	2.036.334	1.927.342	5,66
Beban Jasa Lainnya	1.000.000	1.000.000	0,00
Beban Jasa Penanganan Covid-19	0	0	#DIV/0!
Jumlah	693.789.694	728.402.327	-4,75

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.319.713.406

Beban Pemeliharaan T.A 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.319.713.406,- dan Rp.347.715.348,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk T.A 2025 dan T.A 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.627.592	99.625.782	-8,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61.775.000	61.636.000	0,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156.821.138	176.681.966	-11,24
Beban Penanganan Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan			#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	9.489.676	9.771.600	-2,89
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	319.713.406	347.715.348	-8,05

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.83.963.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.83.963.000,- dan Rp.166.691.829,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	81.263.000	162.191.829	-49,90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	4.500.000	-40,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	83.963.000	166.691.829	-49,63

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp.0*

Beban Bantuan Sosial T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.1.475.020.683*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.475.020.683,- dan Rp.1.418.896.970. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	906.566.653	850.442.940	7
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	568.454.030	568.454.030	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	1.475.020.683	1.418.896.970	4
	-	-	
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.475.020.683	1.418.896.970	4

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk T.A 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.3.141.033

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Penjualan BMN	3.141.033	11.099.355	-
Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.141.033	11.099.355	-71,70

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

*Defisit Pos
Luar Biasa
Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.57.996.277.872

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.57.996.277.872,- dan Rp.59.739.153.277,-.

Defisit LO
Rp(9.417.509.048)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp.(9.417.509.048) dan Rp.(5.807.199.343). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar
Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp.0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.6.794.650.985*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.794.650.985,- dan Rp.4.433.023.653,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(14.987.458)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.302.665.943
Transfer Masuk	506.972.500
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	6.794.650.985

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.(14.987.458,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.6.302.665.943-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Transfer Masuk	DIRJEN BADILMILTUN	506.972.500
3	Transfer Keluar	-	-
	Jumlah		506.972.500

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2025. Hibah langsung yang diterima yaitu sebuah Bangunan Mesjid yang berdiri di atas tanah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp.

55.373.419.809,-

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.55.373.419.809,- dan Rp.57.996.277.872,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap laporan keuangan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu :

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Kuasa Pengguna Anggaran	Imelda Christine, S.E
	Pejabat Pembuat Komitmen	Imelda Christine, S.E
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Dian Puspita
	Bendahara Pengeluaran	Femianti, S.Kom
	Bendahara Penerima	Galih Azizkhan, S.IP
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Ira Rahmawati, ST.

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Armortisasi, Akumulasi
Penyusutan/Armortasi dan Nilai Buku aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
	Manfaat		Per 31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
Tanah							
Tanah	-	28.200.151.000	-	-	-	-	28.200.151.000
Jumlah		28.200.151.000	-	-	-	-	28.200.151.000
Peralatan dan Mesin							
Alat Bantu		515.893.324	(110.548.569)	(73.699.046)	-	(184.247.615)	331.645.709
Alat Angkutan Darat Bermotor		768.137.441	(354.124.941)	(59.144.642)	-	(413.269.583)	354.867.858
Alat Kantor		338.025.520	(240.204.044)	(26.937.726)	-	(267.141.770)	70.883.750
Alat Rumah Tangga		3.485.644.598	(1.471.486.191)	(534.878.057)	-	(2.006.364.248)	1.479.280.350
Alat Studio		398.069.846	(168.927.823)	(61.222.723)	-	(230.150.546)	167.919.300
Alat Komunikasi		10.166.610	(13.694.983)	8.611.678	-	(5.083.305)	5.083.305
Peralatan Pemancar		35.689.564	(5.353.434)	(3.568.956)	-	(8.922.390)	26.767.174
Alat Laboratorium		11.643.700	(2.183.190)	(1.455.460)	-	(3.638.650)	8.005.050
Komputer Unit		826.147.700	(713.431.450)	(1.778.750)	-	(715.210.200)	110.937.500
Peralatan Komputer		312.573.579	(317.163.160)	39.765.178	-	(277.397.982)	35.175.597
Peralatan Kerja Penerbangan		12.813.755	(1.922.063)	(1.281.375)	-	(3.203.438)	9.610.317
Jumlah		6.714.805.637	(3.399.039.848)	(715.589.879)	-	(4.114.629.727)	2.600.175.910
Gedung dan Bangunan							
Bangunan Gedung Tempat Kerja		26.636.494.397	(799.094.835)	(532.729.890)	-	(1.331.824.725)	25.304.669.672
Bangunan Gedung Tempat Tinggal		731.044.000	(181.484.738)	(24.197.966)	-	(205.682.704)	525.361.296
Tugu/Tanda Batas		576.308.661	(54.763.781)	(11.526.174)	-	(66.289.955)	510.018.706
Jumlah		27.943.847.058	(1.035.343.354)	(568.454.030)	-	(1.603.797.384)	26.340.049.674
Jaringan							
Jaringan Listrik		0	0	0	0	-	-
Jaringan Telepon		0	0	0	0	-	-
Jumlah		0	-	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan							
KDP Bangunan		0	0	0	0	-	-
Jumlah		0	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya							
Barang bercorak kesenian		15.064.000	(15.064.000)	0	-	(15.064.000)	-
Buku dan Koleksi Kepustakaan		190.000	0	0	0	-	190.000
Jumlah		15.254.000	(15.064.000)	-	-	(15.064.000)	190.000
Aset Tetap Yg tdk digunakan		0	0	0	-	-	-
ATB Yang tidak digunakan		0	0	0	0	-	-
Jumlah		0	-	-	-	-	-
Total		62.874.057.695	-4.449.447.202	-1.284.043.909	0	-5.733.491.111	57.140.566.584

*) Beban amortisasi

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No.	Uraian	Lokasi	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket.
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-

Lampiran III : Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2025

No.	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1.	-	-	-	Rp. 0	-	-	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,846,425	10,862,400	984,025	9.059
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,846,425	10,862,400	984,025	9.059
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,846,425	10,862,400	984,025	9.059
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,807,802,226	3,115,433,666	3,692,368,560	118.519
Beban Persediaan	52,207,497	52,020,958	186,539	0.359
Beban Barang dan Jasa	693,789,694	728,402,327	(34,612,633)	(4.752)
Beban Pemeliharaan	319,713,406	347,715,348	(28,001,942)	(8.053)
Beban Perjalanan Dinas	83,963,000	166,691,829	(82,728,829)	(49.63)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,475,020,683	1,418,896,970	56,123,713	3.955
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,432,496,506	5,829,161,098	3,603,335,408	61.816
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,420,650,081)	(5,818,298,698)	(3,602,351,383)	61.914
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	3,141,033	11,099,355	(7,958,322)	(71.701)
Pendapatan Pelepasan Aset	3,141,033	11,099,355	(7,958,322)	(71.701)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,141,033	11,099,355	(7,958,322)	(71.701)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,417,509,048)	(5,807,199,343)	(3,610,309,705)	62.17
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,417,509,048)	(5,807,199,343)	(3,610,309,705)	62.17

Keterangan :

FINAL



REVISI
Menteri 2026
Penanggung Jawab UAKPA
kuasa Pengguna Anggaran

NELDA CHRISTINE

Pembina (IV/a) 198007092006042002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	57,996,277,872	59,739,153,277	(1,742,875,405)	(2.92)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,417,509,048)	(5,807,199,343)	(3,610,309,705)	62.17
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(368,699,715)	368,699,715	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(368,699,715)	368,699,715	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,794,650,985	4,433,023,653	2,361,627,332	53.27
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,622,858,063)	(1,742,875,405)	(879,982,658)	50.49
EKUITAS AKHIR	55,373,419,809	57,996,277,872	(2,622,858,063)	(4.52)

Keterangan :

FINAL

Palu, 21 Februari 2026
 Penanggungjawab UAKPA
 Pengguna Anggaran

 IMELDA CHRISTINE
 Permainsi (IV/a) 198007092006042002



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 578850 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl.Data : 21/02/26 12:40 PM
Tgl.Cetak : 21/02/26 2:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,312,750
131111	Tanah	28,200,151,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,714,805,637
133111	Gedung dan Bangunan	27,943,847,058
135121	Aset Tetap Lainnya	15,254,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,114,629,727)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,603,797,384)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15,064,000)
J U M L A H		57,141,879,334



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 578850

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM
Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,325,025,000	6,302,665,943	(22,359,057)	99.65	4,494,749,000	4,439,985,408	(54,763,592)	98.78
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Palu, 21 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Tuasa Pengguna Anggaran

JMLDA CHRISTINE
Pembina N/A/198007092006042002



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1800 **SULAWESI TENGAH**
SATUAN KERJA : 578850 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/02/26 2:18 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/2/26 8:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,156,300,000	1,348,638,000	1,348,602,540	0	1,348,602,540	100	35,460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	22,000	18,245	16	18,229	82.86	3,771
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,800,000	92,927,000	92,916,872	0	92,916,872	99.99	10,128
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,500,000	20,421,000	20,414,353	0	20,414,353	99.97	6,647
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,700,000	36,180,000	36,180,000	0	36,180,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,558,060,000	69,250,000	69,250,000	0	69,250,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	316,000,000	9,412,000	9,407,235	0	9,407,235	99.95	4,765
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58,000,000	62,430,000	62,426,040	0	62,426,040	99.99	3,960
511129	Belanja Uang Makan PNS	248,000,000	240,000,000	225,541,000	0	225,541,000	93.98	14,459,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,000,000	11,585,000	11,585,000	925,000	10,660,000	92.02	925,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162,000,000	143,100,000	143,100,000	0	143,100,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,652,382,000	2,033,965,000	2,019,441,285	925,016	2,018,516,269	99.24	15,448,731
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	376,190,000	375,433,334	0	375,433,334	99.8	756,666
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,482,600,000	2,482,600,000	0	2,482,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	2,858,790,000	2,858,033,334	0	2,858,033,334	99.97	756,666
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	130,000,000	129,884,800	0	129,884,800	99.91	115,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	2,476	0	2,476	49.52	2,524
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	5,853,520	0	5,853,520	97.56	146,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,000,000	1,828,832	0	1,828,832	91.44	171,168
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	7,000,000	6,952,320	0	6,952,320	99.32	47,680
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	37,000,000	32,498,000	0	32,498,000	87.83	4,502,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,060,000	8,060,000	0	8,060,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	190,065,000	185,079,948	0	185,079,948	97.38	4,985,052
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,652,382,000	5,082,820,000	5,062,554,567	925,016	5,061,629,551	99.58	21,190,449
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	674,915,000	542,122,000	542,118,404	0	542,118,404	100	3,596
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,000,000	3,670,000	2,994,700	0	2,994,700	81.6	675,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,750,000	44,640,000	44,640,000	0	44,640,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	739,665,000	590,432,000	589,753,104	0	589,753,104	99.89	678,896

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1800 **SULAWESI TENGAH**
SATUAN KERJA : 578850 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/02/26 2:18 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/2/26 8:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	245,000	0	245,000	81.67	55,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	670,000	0	670,000	95.71	30,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	915,000	0	915,000	91.5	85,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,000,000	56,936,000	56,933,643	0	56,933,643	100	2,357
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	50,000,000	56,936,000	56,933,643	0	56,933,643	100	2,357
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	5,000,000	2,050,000	2,036,434	0	2,036,434	99.34	13,566
522141	Belanja Sewa	18,000,000	76,555,000	76,551,482	0	76,551,482	100	3,518
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,000,000	79,605,000	79,587,916	0	79,587,916	99.98	17,084
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,000,000	91,630,000	91,627,592	0	91,627,592	100	2,408
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61,636,000	61,787,000	61,775,000	0	61,775,000	99.98	12,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,197,000	156,852,000	156,821,138	0	156,821,138	99.98	30,862
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	293,833,000	310,269,000	310,223,730	0	310,223,730	99.99	45,270
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162,527,000	81,263,000	81,263,000	0	81,263,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	167,927,000	83,963,000	83,963,000	0	83,963,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,276,425,000	1,122,205,000	1,121,376,393	0	1,121,376,393	99.93	828,607
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH BELANJA	5,048,807,000	6,325,025,000	6,303,590,959	925,016	6,302,665,943	99.65	22,359,057

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1800 **SULAWESI TENGAH**
SATUAN KERJA : 578850 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/02/26 2:18 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/2/26 8:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,156,300,000	1,348,638,000	1,348,602,540	0	1,348,602,540	100	35,460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	22,000	18,245	16	18,229	82.86	3,771
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,800,000	92,927,000	92,916,872	0	92,916,872	99.99	10,128
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,500,000	20,421,000	20,414,353	0	20,414,353	99.97	6,647
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,700,000	36,180,000	36,180,000	0	36,180,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,558,060,000	69,250,000	69,250,000	0	69,250,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	316,000,000	9,412,000	9,407,235	0	9,407,235	99.95	4,765
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58,000,000	62,430,000	62,426,040	0	62,426,040	99.99	3,960
511129	Belanja Uang Makan PNS	248,000,000	240,000,000	225,541,000	0	225,541,000	93.98	14,459,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,000,000	11,585,000	11,585,000	925,000	10,660,000	92.02	925,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162,000,000	143,100,000	143,100,000	0	143,100,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,652,382,000	2,033,965,000	2,019,441,285	925,016	2,018,516,269	99.24	15,448,731
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	376,190,000	375,433,334	0	375,433,334	99.8	756,666
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,482,600,000	2,482,600,000	0	2,482,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	2,858,790,000	2,858,033,334	0	2,858,033,334	99.97	756,666
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	130,000,000	129,884,800	0	129,884,800	99.91	115,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	2,476	0	2,476	49.52	2,524
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	5,853,520	0	5,853,520	97.56	146,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,000,000	1,828,832	0	1,828,832	91.44	171,168
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	7,000,000	6,952,320	0	6,952,320	99.32	47,680
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	37,000,000	32,498,000	0	32,498,000	87.83	4,502,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,060,000	8,060,000	0	8,060,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	190,065,000	185,079,948	0	185,079,948	97.38	4,985,052
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,652,382,000	5,082,820,000	5,062,554,567	925,016	5,061,629,551	99.58	21,190,449
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	674,915,000	542,122,000	542,118,404	0	542,118,404	100	3,596
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,000,000	3,670,000	2,994,700	0	2,994,700	81.6	675,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,750,000	44,640,000	44,640,000	0	44,640,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	739,665,000	590,432,000	589,753,104	0	589,753,104	99.89	678,896

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1800 **SULAWESI TENGAH**
SATUAN KERJA : 578850 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/02/26 2:18 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/2/26 8:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	245,000	0	245,000	81.67	55,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	670,000	0	670,000	95.71	30,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	915,000	0	915,000	91.5	85,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,000,000	56,936,000	56,933,643	0	56,933,643	100	2,357
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	50,000,000	56,936,000	56,933,643	0	56,933,643	100	2,357
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	5,000,000	2,050,000	2,036,434	0	2,036,434	99.34	13,566
522141	Belanja Sewa	18,000,000	76,555,000	76,551,482	0	76,551,482	100	3,518
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,000,000	79,605,000	79,587,916	0	79,587,916	99.98	17,084
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,000,000	91,630,000	91,627,592	0	91,627,592	100	2,408
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61,636,000	61,787,000	61,775,000	0	61,775,000	99.98	12,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,197,000	156,852,000	156,821,138	0	156,821,138	99.98	30,862
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	293,833,000	310,269,000	310,223,730	0	310,223,730	99.99	45,270
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162,527,000	81,263,000	81,263,000	0	81,263,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	167,927,000	83,963,000	83,963,000	0	83,963,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,276,425,000	1,122,205,000	1,121,376,393	0	1,121,376,393	99.93	828,607
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	120,000,000	120,000,000	119,659,999	0	119,659,999	99.72	340,001
	JUMLAH BELANJA	5,048,807,000	6,325,025,000	6,303,590,959	925,016	6,302,665,943	99.65	22,359,057

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1800 **SULAWESI TENGAH**
SATUAN KERJA : 578850 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/02/26 2:18 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,141,033	0	3,141,033	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10,714,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	11,846,425	0	11,846,425	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	10,714,000	14,987,458	0	14,987,458	139.89
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	10,714,000	14,987,458	0	14,987,458	139.89
	JUMLAH PENDAPATAN	10,714,000	14,987,458	0	14,987,458	139.89

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM
Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,494,515	1,416,815	77,700	5.48
Persediaan	1,312,750	6,076,280	(4,763,530)	(78.40)
JUMLAH ASET LANCAR	2,807,265	7,493,095	(4,685,830)	(62.54)
ASET TETAP				
Tanah	28,200,151,000	28,200,151,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,714,805,637	6,279,149,912	435,655,725	6.94
Gedung dan Bangunan	27,943,847,058	27,943,847,058	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	15,254,000	15,254,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,733,491,111)	(4,449,447,202)	(1,284,043,909)	28.86
JUMLAH ASET TETAP	57,140,566,584	57,988,954,768	(848,388,184)	(1.46)
JUMLAH ASET	57,143,373,849	57,996,447,863	(853,074,014)	(1.47)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,769,954,040	169,991	1,769,784,049	1,041,104.56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,769,954,040	169,991	1,769,784,049	1,041,104.56
JUMLAH KEWAJIBAN	1,769,954,040	169,991	1,769,784,049	1,041,104.56
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	55,373,419,809	57,996,277,872	(2,622,858,063)	(4.52)
JUMLAH EKUITAS	55,373,419,809	57,996,277,872	(2,622,858,063)	(4.52)
JUMLAH EKUITAS	55,373,419,809	57,996,277,872	(2,622,858,063)	(4.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57,143,373,849	57,996,447,863	(853,074,014)	(1.47)

Keterangan :
FINAL


Palu, 21 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
NIMELDA CHRISTINE
Pembina (NIP) 198007092006042002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1800
SATUAN KERJA : 578850

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl. Cetak 21/02/2026 2:18 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,416,815	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,076,280	0
0.0	131111	Tanah	28,200,151,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,279,149,912	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	27,943,847,058	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,254,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,399,039,848
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,035,343,354
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	15,064,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	169,991
0.0	391111	Ekuitas	0	57,996,277,872
JUMLAH			62,445,895,065	62,445,895,065

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,494,515	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,312,750	0
0.0	131111	Tanah	28,200,151,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,714,805,637	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	27,943,847,058	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,254,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,114,629,727
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,603,797,384
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	15,064,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,746,172,675
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	23,781,365
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,302,665,943
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,987,458	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	506,972,500
0.0	391111	Ekuitas	0	57,996,277,872
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,141,033
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	11,846,425
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,348,602,540	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,229	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	92,916,872	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,414,353	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36,180,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	69,250,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,407,235	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	62,426,040	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	225,541,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,660,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	143,100,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	772,206,009	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,832,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	129,884,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,476	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,853,520	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,828,832	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,952,320	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	32,498,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,060,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	542,118,404	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 7:42 AM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,994,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,640,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	245,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	670,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	23,611,474	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,036,334	0
3.0	522141	Beban Sewa	76,473,782	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91,627,592	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61,775,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,821,138	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	81,263,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	906,566,653	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	568,454,030	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	52,207,497	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,489,676	0
JUMLAH			72,324,348,924	72,324,348,924

Keterangan :

FINAL



Palu, 21 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

IMELDA CHRISTINE

Pembina (PNS) 198007092006042002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,302,665,943
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	14,987,458	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,141,033
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	11,846,425
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,348,602,540	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,245	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	92,916,872	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,414,353	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,180,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	69,250,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,407,235	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,426,040	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	225,541,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,585,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	143,100,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	375,433,334	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,482,600,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	129,884,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,476	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,853,520	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,828,832	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,952,320	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	32,498,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,060,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	542,118,404	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,994,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,640,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	245,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	670,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,933,643	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,036,434	0
3.0	522141	Belanja Sewa	76,551,482	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91,627,592	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61,775,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,821,138	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81,263,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (578850) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tgl Data : 21/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 2:17 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119,659,999	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	16
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	925,000
JUMLAH			6,318,578,417	6,318,578,417

Keterangan :

FINAL



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 1800 KOTA PALU
 Satuan Kerja : 578850 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 No. Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	522111	Beban Langganan Listrik	23.611.474	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		23.611.474

Dibuat oleh : PLH. Kasubbag Umum dan Keu
 Tanggal : 31 Desember 2025

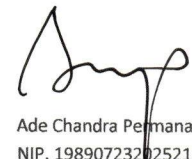
Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 31 Desember 2025


 Dian Puspita, S.H.
 NIP. 198709242006042001



Imelda Christine, S.E.
 NIP. 198007092006042002


 Ade Chandra Permana, S.Si.
 NIP. 198907232025211037

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menginput pada Modul GLP pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Beban yang Masih Harus dibayar.

KARTU RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2025

Kode Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang masih harus dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1800 Sulawesi Tengah	578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	2025	522111	Beban Langganan Listrik	23.611.474	Kwitansi Pembayaran	Tagihan Bulan Desember 2025
Jumlah						23.611.474		



Palu, 31 Desember 2025
Kuasasa Pengguna Anggaran,

Amelda Christine, S.E.
NIP. 198007092006042002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 1800 KOTA PALU
 Satuan Kerja : 578850 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 No. Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	522112	Beban Langganan Telpon	55.891	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		55.891

Dibuat oleh : PLH. Kasubbag Umum dan Keu
 Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 31 Desember 2025


 Dian Puspita, S.H.
 NIP. 198709242006042001




 Inelda Christine, S.E.
 NIP. 198007092006042002


 Ade Chandra Permana, S.Si.
 NIP. 198907232025211037

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menginput pada Modul GLP pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Beban yang Masih Harus dibayar.

KARTU RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2025

Kode Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang masih harus dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1800 Sulawesi Tengah	578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	2025	522112	Beban Langganan Telepon	55.891	Kwitansi Pembayaran	Tagihan Bulan Desember 2025
Jumlah						55.891		



Palu, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Rozelda Christine, S.E.
NIP. 198007092006042002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 1800 KOTA PALU
 Satuan Kerja : 578850 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 No. Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Kartu Belanja Yang Masih Harus dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	522112	Beban Langganan Kartu Hallo	114.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		114.000

Dibuat oleh : PLH. Kasubbag Umum dan Keu
 Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh
 Tanggal

: KPA
 : 31 Desember 2025

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 31 Desember 2025


 Dian Puspita, S.H.
 NIP. 198709242006042001



Imelda Christine, S.E.
 NIP. 198007092006042002


 Ade Chandra Permana, S.S.I.
 NIP. 198907232025211037

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menginput pada Modul GLP pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Beban yang Masih Harus dibayar.

KARTU RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2025

Kode Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang masih harus dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1800 Sulawesi Tengah	578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	2025	522112	Beban Langganan Kartu Hallo	114.000	Kwitansi Pembayaran	Tagihan Bulan Desember 2025
Jumlah						114.000		



 Palu, 31 Desember 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,

 Maelda Christine, S.E.
 NIP. 198007092006042002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 1800 KOTA PALU
 Satuan Kerja : 578850 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 No. Dokumen : Kartu Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114112	Belanja Barang Yang dibayar di Muka	1.494.516	
	K	522141	Beban Keperluan Perkantoran		1.494.516

Dibuat oleh : PLH. Kasubbag Umum dan Keu
 Tanggal : 31 Desember 2025

Dian Puspita, S.H.
 NIP. 198709242006042001

Disetujui oleh
 Tanggal



: 31 Desember 2025

Imelda Christine, S.E.
 NIP. 198807092006042002

Direkam oleh
 Tanggal

: Operator GLP
 : 31 Desember 2025

Ade Chandra Permama, S.Si.
 NIP. 198907232015211037

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menginput pada Modul GLP pada menu Jurnal Penyesuaian Beban dibayar di muka

**RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA BARANG DI BAYAR DIMUKA (Prepaid)
PER 31 DESEMBER 2025**

Nama Barang	Jumlah Bayar	Jangka Waktu Pemakaian	Tagihan Per Bulan	Jumlah pembayaran sd 31 Desember 2024	Sisa Akrual	Saldo Sisa Yang Diakrualkan	Rincian Angsuran Akun Yang dipakai				Jumlah	Dokumen Sumber
							9	10	11	12		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Web Hosting	17.934.182	12 Bulan	-	16.439.666	1 Bulan	1.494.516	-	-	-	-	1.494.516	Kwitansi Pembayaran
JUMLAH						1.494.516	-	-	-	-	1.494.516	



Pale, 31 Desember 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,
[Signature]
 Imelda Christine, S.E.
 NIP. 198007092906042002